

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Kota Bengkulu adalah salah satu kota, sekaligus ibu kota Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, dengan terbentuknya Provinsi Bengkulu maka Kota madya Bengkulu sekaligus menjadi ibukota bagi provinsi tersebut. Namun UU tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 dan sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi provinsi ke-26. Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dengan luas wilayah 144,52 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 308.544 jiwa.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Bengkulu periode 2008-2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah
Kota Bengkulu Tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Kenaikan	Persentase
2008	29.979.202.000	-	-
2009	34.582.971.796	4.603.769.796	15 %
2010	41.533.806.022	6.950.834.226	20 %
2011	46.574.964.682	5.041.158.660	12 %
2012	54.820.968.854	8.246.004.172	18 %

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012.

Gambar 4.1
Pendapatan Asli Daerah
Kota Bengkulu Tahun 2008-2012



Tabel dan gambar di atas memperlihatkan, pada tahun 2008-2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 15% (4.603.769.796) , hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada pendapatan

pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir (200.000.000), hasil retribusi daerah yang terdiri dari retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (1.840.144.583), hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari PT Bank Bengkulu (406.952.083) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari penerimaan jasa giro (2.156.673.130). Pada tahun 2009-2010, Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 20% (6.950.834.226), hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada pendapatan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan galian golongan C, pajak parkir dan pajak burung walet (2.423.701.119), hasil retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, (2.862.409.453), hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari PT Bank Bengkulu (265.630.282) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari penerimaan jasa giro (1.399.093.370).

Pada tahun 2010-2011, Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 12% (5.041.158.660) hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada pendapatan pajak daerah yang mana terjadi kenaikan pada bagian pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet (4.978.282.681) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari penerimaan jasa giro (105.439.782), tetapi mengalami penurunan pada hasil retribusi daerah

yang mana penurunan tersebut terjadi pada retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (42.563.802), sedangkan pada hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak mengalami perubahan (265.630.282). Pada tahun 2011-2012, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 18% (8.246.004.172) hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada pendapatan pajak daerah yang terdiri dari pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (2.271.300.120), hasil retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu (4.817.000.000), hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari PT Bank Bengkulu (777.417.635) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari penerimaan jasa giro, dan pendapatan kemitraan dengan pihak ketiga (380.286.417).

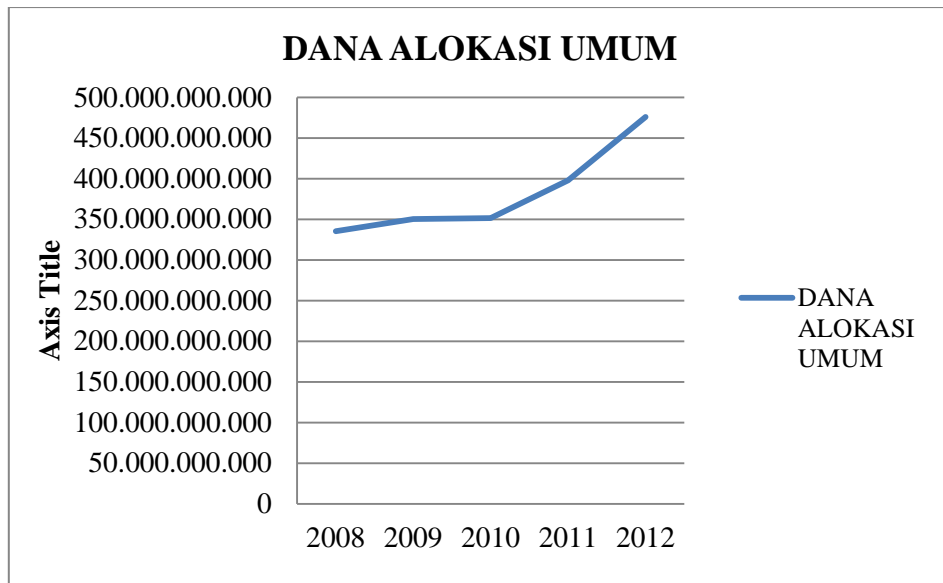
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel 4.2
Dana Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2008-2012

Tahun	Dana Alokasi Umum	Kenaikan	persentase
2008	335.328.093.000	-	-
2009	350.293.210.000	14.965.117.000	4%
2010	351.461.812.000	1.168.602.000	0,3%
2011	397.878.445.000	46.416.633.000	13%
2012	475.745.500.000	77.867.055.000	19%

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012.

Gambar 4.2
Dana Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2008-2012



Tabel dan gambar di atas, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintahan Kota Bengkulu setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan terbesarnya terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu sebesar 19% (77.867.055.000). Seberapa besar Dana Alokasi Umum yang di terima oleh pemerintah daerah tergantung dari pemerintah pusat karena Dana Alokasi Umum itu sendiri bersumber dari APBN. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan : Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

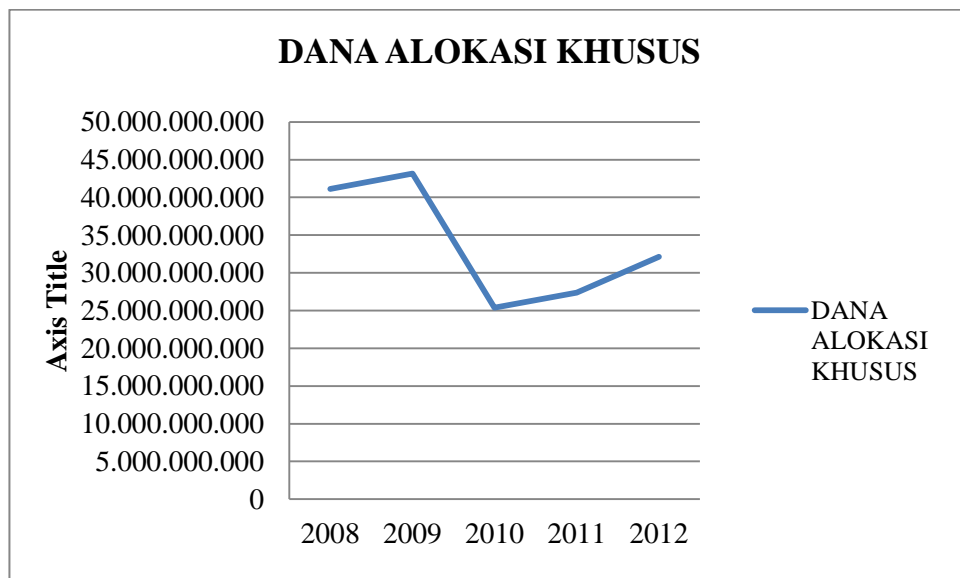
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 4.3
Dana Alokasi Khusus
Pemerintahan Kota Bengkulu 2008-2012

Tahun	Dana Alokasi Khusus	Kenaikan	Persentase
2008	41.099.000.000	-	-
2009	43.175.000.000	2.076.000.000	5%
2010	25.364.700.000	-17.810.300.000	-41%
2011	27.371.500.000	2.006.800.000	8%
2012	32.144.200.000	4.772.700.000	-17%

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012.

Gambar 4.3
Dana Alokasi Khusus
Pemerintahan Kota Bengkulu 2008-2012



Tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2008-2009 Dana Alokasi Khusus pemerintahan kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 5% (2.076.000.000), hal ini disebabkan karena adanya peningkatan

pada DAK perikanan (73.000.000), DAK kesehatan (79.000.000), DAK infrastruktur jalan (741.000.000), DAK irigasi (58.000.000), DAK air bersih (173.000.000), DAK lingkungan hidup (235.000.000), tetapi mengalami penurunan pada DAK pertanian (215.000.000) dan pada DAK pendidikan tidak mengalami perubahan (15.013.000.000). Tahun 2009 juga mengalami penambahan Dana Alokasi Khusus, yaitu DAK keluarga berencana (932.000.000) yang di tahun 2008 tidak dialokasikan. Pada tahun 2009-2010 Dana Alokasi Khusus pemerintahan kota Bengkulu mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 41% (17.810.300.000) hal ini di sebabkan karena adanya penurunan jumlah pada DAK pendidikan (1.287.400.000), DAK periklanan (55.800.000), DAK kesehatan (4.592.500.000), DAK infrastuktur jalan (6.614.800.000), DAK irigasi (1.237.200.000), DAK air bersih (1.905.800.000), DAK lingkungan hidup (135.700.000), DAK keluarga berencana (131.400.000) serta di tahun 2010 DAK pertanian diganti dengan DAK sanitasi sebesar 972.300.000. Pada tahun 2010-2011 Dana Alokasi khusus pemerintah kota Bengkulu kembali mengalami kenaikan sebesar 8% (2.006.800.000), kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada DAK periklanan (1.138.300.000), DAK kesehatan (675.700.000), DAK infrastuktur jalan (1.160.500.000), DAK irigasi (536.300.000), DAK air bersih (233.700.000), DAK lingkungan hidup (101.400.000), DAK keluarga berencana (141.500.000), akan tetapi ada berapa yang mengalami penurunan yaitu DAK pendidikan (5.196.900.000) dan DAK sanitasi (51.700.000).

Pada tahun 2011 juga dilakukan penambahan Dana Alokasi Khusus yaitu DAK kehutanan (1.022.700.000), DAK transportasi darat (298.100.000), dan DAK pemukiman dan perumahan (1.947.200.000). Pada tahun 2011-2012 Dana Alokasi Khusus pemerintah kota Bengkulu, mengalami kenaikan sebesar 17% (4.772.700.000) kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada DAK pendidikan (3.325.970.000), DAK infrastuktur jalan (401.670.000), DAK air bersih (163.570.000), DAK lingkungan hidup (184.520.000), DAK sanitasi (141.540.000), DAK kehutanan (18.900.000), DAK transportasi darat (52.810.000), DAK pemukiman dan perumahan (1.789.370.000). Selain kenaikan, juga ada penurunan yang di alami oleh DAK periklanan (838.380.000), DAK kesehatan (928.380.000), DAK irigasi (209.320.000). Di tahun 2012 dilakukan kembali penambahan Dana Alokasi Khusus yaitu DAK perdagangan sebesar 763.540.000.

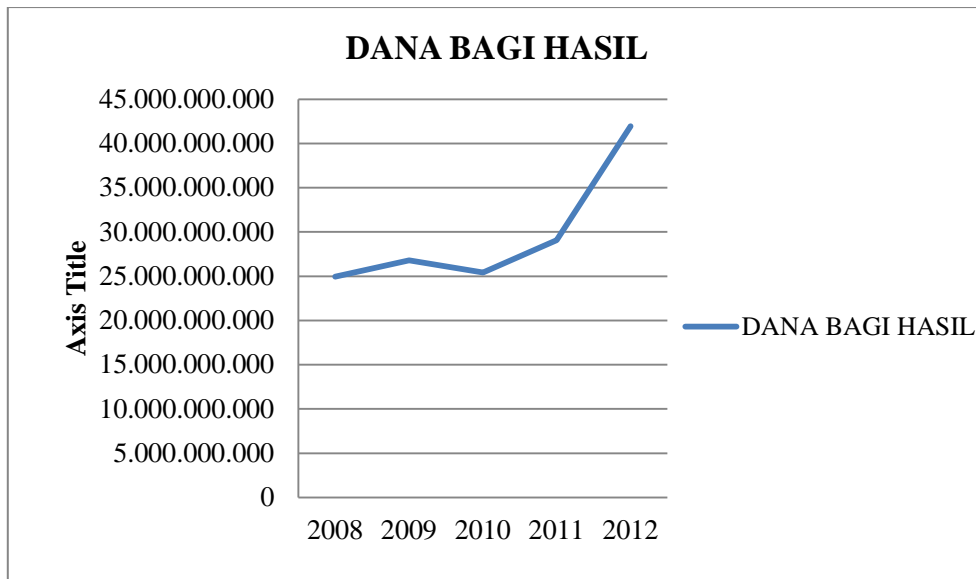
4. Dana Bagi Hasil (DBH).

Tabel 4.4
Dana Bagi Hasil
Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2008-2012

Tahun	Dana Bagi Hasil	Kenaikan	Persentase
2008	24.961.955.906	-	-
2009	26.785.041.384	1.823.085.478	7%
2010	25.424.293.453	-1.360.747.931	-5%
2011	29.084.351.348	3.660.057.895	14%
2012	41.940.358.395	-12.856.007.047	-44%

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012.

Gambar 4.4
Dana Bagi Hasil
Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2008-2012



Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Dilihat dari gambar dan tabel di atas maka dapat dilihat pada tahun 2008-2009 Dana Bagi Hasil pemerintah kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 7% (1.823.085.478) kenaikan ini dapat terjadi karena adanya kenaikan pada Dana Bagi Hasil Pajak (1.753.868.349) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (69.217.130).

Pada tahun 2009-2010 Dana Bagi Hasil pemerintah kota Bengkulu mengalami penurunan sebesar 5% (1.360.747.931) hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan pada Dana Bagi Hasil Pajak (1.360.747.931) dan pada Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam jumlahnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Pada tahun 2010-2011 Dana Bagi Hasil pemerintahan kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 14% (3.660.057.895) yang menjadi penyebab kenaikan ini karena adanya kenaikan pada Dana Bagi Hasil Pajak (3.592.706.912) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (67.350.982). Sedangkan pada tahun 2011-2012 Dana Bagi Hasil pemerintah kota Bengkulu mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 44% (12.856.007.047) kenaikan yang cukup besar ini terjadi karena adanya kenaikan pada Dana Bagi Hasil Pajak (10.884.263.236) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (1.272.832.829).

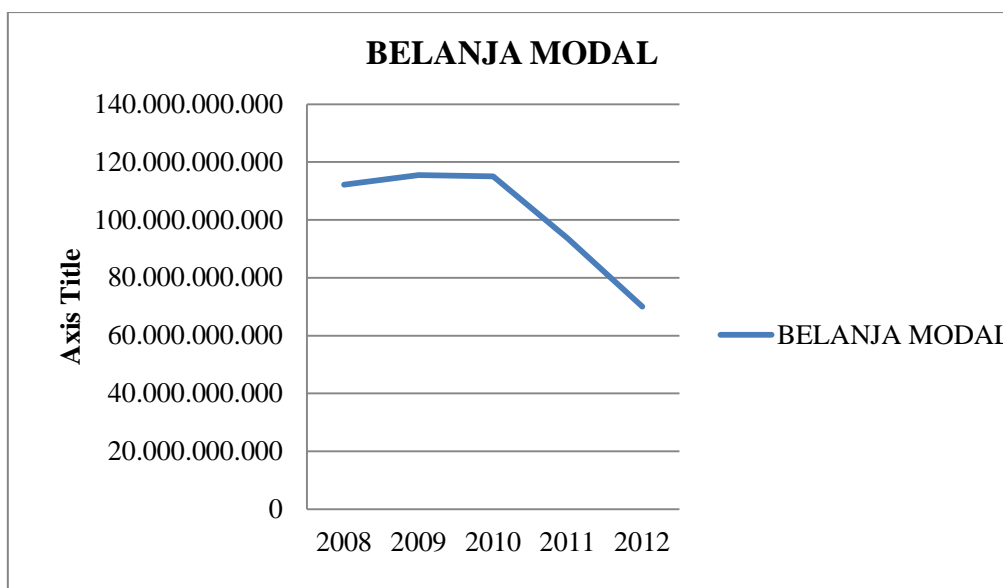
5. Belanja Modal

Tabel 4.5
Belanja Modal
Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2008-2012

Tahun	Belanja Modal	Kenaikan	Persentase
2008	112.180.601.172	-	-
2009	115.542.080.233	3.361.479.061	3%
2010	115.111.396.042	-430.684.191	-0,4%
2011	93.577.117.148	-21.534.278.894	-18%
2012	69.968.319.945	-23.608.797.203	-25%

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012.

Gambar 4.5
Belanja Modal
Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2008-2012



Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

Berdasarkan gambar dan tabel di atas dapat dilihat bagaimana pengalokasian belanja modal pemerintahan kota Bengkulu pada tahun 2008-2012, yang mana pada tahun 2008-2009 belanja modalnya mengalami

kenaikan yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 3% (3.361.479.061). Sedangkan pada tahun berikutnya dari tahun 2009-2012 belanja modal pada pemerintahan kota Bengkulu terus mengalami penurunan yaitu 2009-2010 sebesar 0,4% (430.684.191), tahun 2010-2011 sebesar 18% (21.534.278.894) dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu sebesar 25% (23.608.797.203). Hal ini membuktikan kalau belanja modal belum menjadi prioritas utama pemerintah kota Bengkulu.

4.2 Pembahasan

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah

juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relatif kecil. Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*closed-list*) artinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007). Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Apabila pemerintah terlalu menekankan pada perolehan PAD, maka masyarakat akan semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud "pencapaian target" (Widjaja, 2005). Sikap eksploitatif tersebut dapat memberatkan masyarakat karena masyarakat telah dibebani adanya pajak nasional yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah pemerintah kota Bengkulu sudah baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu yang mana pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 29.979.202.000 atau

sekitar 6% dari total pendapatan pemerintah kota Bengkulu yaitu 450.130.260.146. Pada tahun 2009, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu adalah sebesar 34.582.971.796 atau sekitar 7% dari total pendapatan pemerintah kota Bengkulu yaitu 491.162.327.128. Pada Tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu sebesar 41.533.806.022 atau sekitar 7% dari total pendapatan yang didapatkan yaitu 545.397.764.555. Pada tahun 2011 kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah adalah sebesar 46.574.964.682, jumlah ini sekitar 7% dari total pendapatan pemerintahan kota Bengkulu yaitu sebesar 615.877.514.247 dan yang terakhir di tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 54.820.968.854 atau sekitar 8% dari total pendapatan yang didapatkan pemerintahan kota Bengkulu yaitu 679.024.009.266 terhadap keuangan daerah.

Dengan demikian setiap tahunnya dari tahun 2008-2012 Pendapatan Asli Daerah kota Bengkulu terus mengalami kenaikan tanpa sekalipun mengalami penurunan, hal ini pun membuktikan kalau pemerintah kota Bengkulu sudah berupaya untuk memaksimalnya Pendapatan Asli Daerahnya. Sehingga untuk kedepannya kedepannya kontribusi Pendapatan Asli daerah dalam keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu harus dipertahankan dan terus lebih dimaksimalkan lagi sumber-sumber pendapatan yang ada. Karena semakin banyak Pendapatan Asli daerah yang didapatkan, maka masyarakat kota Bengkulu juga akan semakin sejahterah. Selain itu, dibandinglan dengan pemerintahan kabupaten yang lain, yang ada di Provinsi Bengkulu (tabel 4.6 dan tabel 4.7), Pendapatan

Asli Daerah yang didapatkan oleh pemerintah kota Bengkulu, total jumlahnya adalah yang paling tinggi dari periode 2008-2012 yaitu sebesar 207.488.000.000 dengan rata-rata pertahunnya adalah 41.497.600.000. Kabupaten yang memiliki PAD paling kecil dari periode 2008-2012 adalah kabupaten Bengkulu Tengah yaitu dengan total jumlah 15.484.000.000 dan rata-rata pertahunnya adalah 3.096.800.000, hal ini wajar terjadi karena Kabupaten Bengkulu Tengah baru terbentuk di tahun 2009. Jadi kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten termuda yang ada di Provinsi Bengkulu.

Tabel 4.6
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012
(dalam jutaan)

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Bengkulu Selatan	12.906	17.391	15.189	14.342	13.866
Bengkulu Utara	15.993	19.924	20.900	24.663	25.889
Rejang Lebong	20.477	17.992	31.118	30.924	25.886
Kaur	5.801	7.641	11.001	7.268	6.848
Seluma	4.151	9.857	12.465	7.268	7.622
Muko-muko	6.669	12.000	25.789	20.000	17.500
Lebong	12.513	11.420	23.895	9.421	15.000
Kepahiang	9.153	10.666	15.097	15.962	15.183
Bengkulu Tengah	-	2.563	2.563	3.790	6.568
Kota Bengkulu	29.979	34.582	41.533	46.574	54.820

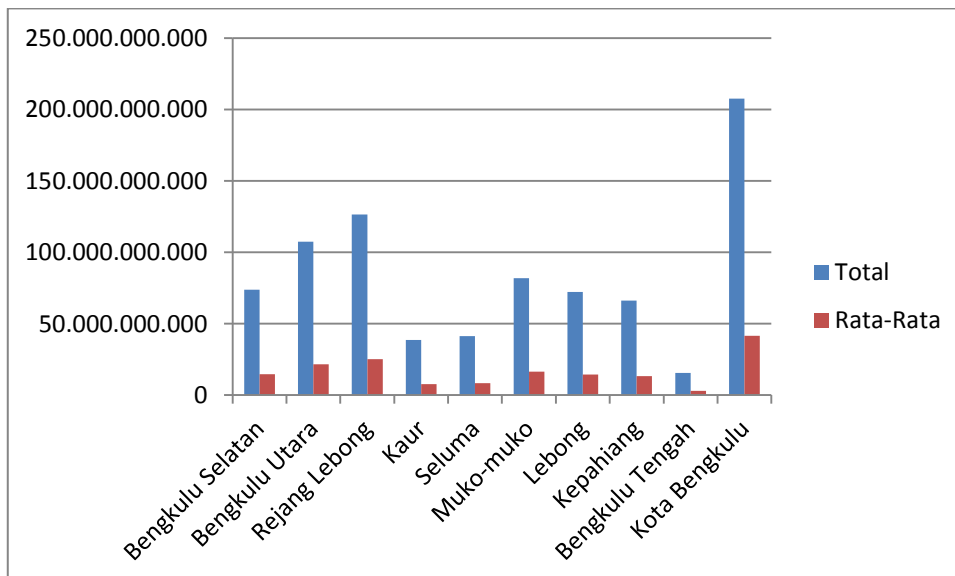
Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Tabel 4.7
Rata-Rata
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012

Kabupaten/Kota	Total	Rata-Rata
Bengkulu Selatan	73.694.000.000	14.738.800.000
Bengkulu Utara	107.369.000.000	21.473.800.000
Rejang Lebong	126.397.000.000	25.279.400.000
Kaur	38.559.000.000	7.711.800.000
Seluma	41.363.000.000	8.272.600.000
Muko-muko	81.958.000.000	16.391.600.000
Lebong	72.249.000.000	14.449.800.000
Kepahiang	66.061.000.000	13.212.200.000
Bengkulu Tengah	15.484.000.000	3.096.800.000
Kota Bengkulu	207.488.000.000	41.497.600.000
Total Keseluruhan	830.622.000.000	83.062.200.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Gambar 4.6
Rata-Rata
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012



4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. DAU bersifat “*block grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD. Walaupun demikian, DAU masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah, hal ini terbukti dengan besarnya jumlah Dana Alokasi Umum

dalam keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, mulai dari tahun 2008 sebesar 335.328.093.000 atau sekitar 74% dari total pendapatan pemerintah kota Bengkulu yang sebesar 450.130.260.146. Pada tahun 2009 jumlah Dana Alokasi Umum dalam keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu sebesar 350.293.210.000, jumlah ini sama halnya dengan 71% dari total pendapatan yang didapatkan. Tahun 2010 proporsi sumbangan Dana Alokasi Umum dalam keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu sebesar 351.461.812.000 atau sama dengan 64% dari total pendapatan daerah 545.397.764.555. Pada tahun 2011 jumlah Dana Alokasi Umum semakin dalam keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu semakin bertambah yaitu 397.878.445.000 atau sama dengan 64% dari 615.877.514.247, dan yang terakhir di tahun 2012 jumlah proporsi Dana Alokasi Umum dalam keuangan daerah adalah yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 475.745.500.000 yang jumlah ini sama dengan 70% dari total pendapatan pemerintah kota Bengkulu 679.024.009.266.

Berdasarkan penjelasan diatas membuktikan pernyataan bahwa proporsi Dana Alokasi Umum dalam keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Harianto, 2007), ini berarti pemerintah daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Dari semua kabupaten dan kota yang ada di provinsi Bengkulu (tabel 4.8 dan tabel 4.9), kota Bengkulu mendapatkan Dana Alokasi Umum terbesar yaitu 1.910.705.000.000 dengan rata-rata pertahunnya 382.141.000.000 dan yang terkecil adalah kabupaten

Bengkulu Tengah yaitu 826.840.000.000 dengan rata-rata pertahunnya 165.368.000.000.

Tabel 4.8
Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012
(dalam jutaan)

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Bengkulu Selatan	267.650	272.435	285.482	322.484	396.665
Bengkulu Utara	378.637	306.075	327.442	374.569	448.066
Rejang Lebong	316.030	321.217	333.094	374.730	448.469
Kaur	200.861	204.914	229.146	248.927	301.077
Seluma	243.560	247.384	257.751	287.335	349.783
Muko-muko	223.756	234.105	249.927	282.109	338.203
Lebong	207.672	207.907	218.619	245.712	312.274
Kepahiang	214.515	215.420	234.497	264.750	317.587
Bengkulu Tengah	-	79.376	208.428	250.161	288.875
Kota Bengkulu	335.328	350.293	351.461	397.878	475.745

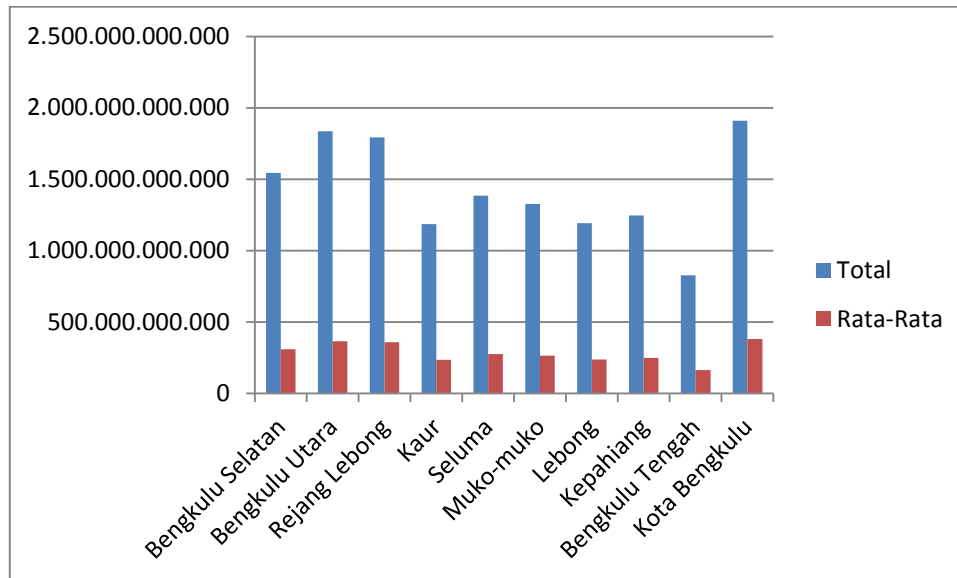
Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Tabel 4.9
Rata-Rata
Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012

Kabupaten/Kota	Total	Rata-Rata
Bengkulu Selatan	1.544.716.000.000	308.943.200.000
Bengkulu Utara	1.834.789.000.000	366.957.800.000
Rejang Lebong	1.793.540.000.000	358.708.000.000
Kaur	1.184.925.000.000	236.985.000.000
Seluma	1.385.813.000.000	277.162.600.000
Muko-muko	1.328.100.000.000	265.620.000.000
Lebong	1.192.184.000.000	238.436.800.000
Kepahiang	1.246.769.000.000	249.353.800.000
Bengkulu Tengah	826.840.000.000	165.368.000.000
Kota Bengkulu	1.910.705.000.000	382.141.000.000
Total Keseluruhan	14.248.381.000.000	1.424.838.100.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Gambar 4.7
Rata-Rata
Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012



4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal. DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003).

Hasil penelitian yang telah dilakukan, jumlah Dana Alokasi Khusus pada keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu dari tahun 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2008 jumlah Dana Alokasi Khususnya adalah sekitar 9% dari total pendapatan pada keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu. Tahun 2009 kontribusi Dana Alokasi Khusus dalam keuangan daerah kota Bengkulu adalah sebesar 43.175.000.000 atau sama dengan 8% dari 491.162.327.128 yang merupakan total pendapatan. Di tahun selanjutnya 2010, besaran Dana Alokasi Khusus dalam keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu adalah 25.364.700.000 atau sama dengan 4% dari total pendapatan (mengalami penurunan).

Pada tahun 2011 kontribusi Dana Alokasi Khusus dalam keuangan daerah adalah 4% dari 615.877.514.247 (total pendapatan). Tahun yang terakhir, yaitu tahun 2012 jumlah Dana Alokasi Khusus dalam keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu adalah sebesar 32.144.200.000 atau sama dengan 4% dari 679.024.009.266 (total pendapatan). Dana Alokasi Khusus pada pemerintahan kota Bengkulu terdiri dari 14 jenis Dana Alokasi Khusus, yaitu DAK pendidikan, DAK periklanan, DAK kesehatan, DAK infrastuktur jalan, DAK irigasi, DAK air bersih, DAK lingkungan hidup, DAK keluarga berencana, DAK sanitasi, DAK kehutanan, DAK transfortasi darat, DAK pemukiman dan perumahan dan yang terakhir adalah DAK perdagangan. Selain itu bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi Bengkulu (tabel 4.10 dan tabel 4.11), yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus terbesar adalah pemerintah kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah 293.573.000.000 dan rata-rata pertahunnya

sebesar 58.714.600.000. Sedangkan yang mendapatkan Dana Alokasi Umum terkecil adalah pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu sebesar 143.521.000.000 dengan rata-rata pertahunnya 28.704.200.000, jumlah ini dari periode 2008-2012.

Tabel 4.10
Dana Alokasi Khusus
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012
(dalam jutaan)

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Bengkulu Selatan	65.318	50.196	35.982	37.643	44.195
Bengkulu Utara	68.577	85.235	46.218	51.089	42.454
Rejang Lebong	56.625	56.425	47.610	40.064	48.953
Kaur	41.924	49.004	39.574	36.428	38.413
Seluma	51.822	50.660	35.374	38.360	50.281
Muko-muko	44.680	52.385	34.315	34.742	39.952
Lebong	35.093	38.341	26.130	26.260	37.744
Kepahiang	59.015	57.761	30.799	33.842	29.762
Bengkulu Tengah	-	4.202	43.860	58.695	36.764
Kota Bengkulu	41.099	43.175	25.364	27.371	32.144

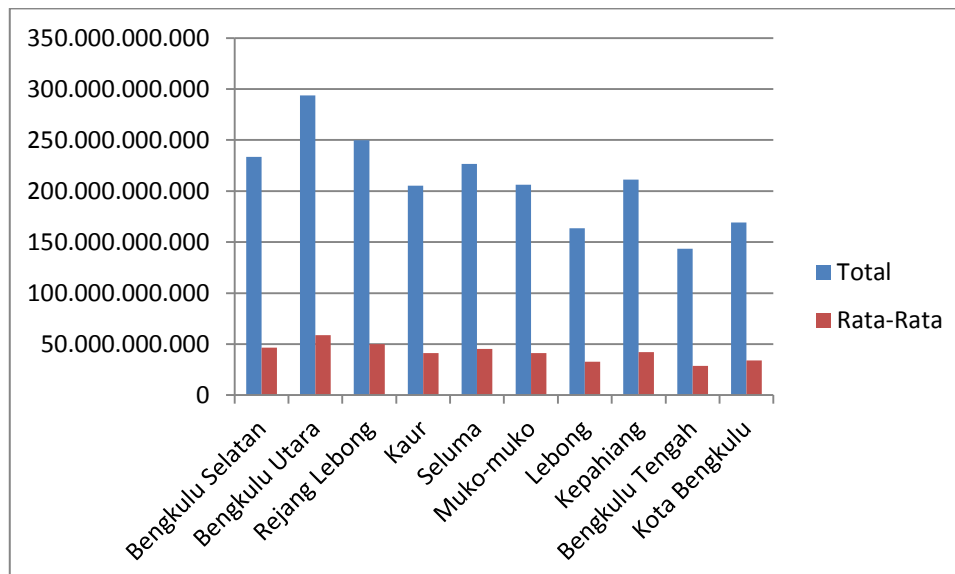
Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Tabel 4.11
Rata-Rata
Dana Alokasi Khusus
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012

Kabupaten/Kota	Total	Rata-Rata
Bengkulu Selatan	233.334.000.000	46.666.800.000
Bengkulu Utara	293.573.000.000	58.714.600.000
Rejang Lebong	249.677.000.000	49.935.400.000
Kaur	205.343.000.000	41.068.600.000
Seluma	226.497.000.000	45.299.400.000
Muko-muko	206.074.000.000	41.214.800.000
Lebong	163.568.000.000	32.713.600.000
Kepahiang	211.179.000.000	42.235.800.000
Bengkulu Tengah	143.521.000.000	28.704.200.000
Kota Bengkulu	169.153.000.000	33.830.600.000
Total Keseluruhan	2.101.919.000.000	210.191.900.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Gambar 4.8
Rata-Rata
Dana Alokasi Khusus
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012



4.2.4 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, tapi apabila transfer DBH diprediksi mengalami penurunan, pemerintah daerah berupaya menaikkan PAD sebagai sumber dana pengganti bagi pembiayaan aktivitas belanja pemerintah daerah. Hal tersebut dapat mendorong tercapainya otonomi daerah melalui kemandirian keuangan di mana pemerintah daerah harus dapat memenuhi pembiayaan daerah melalui pendapatan yang diperoleh berdasarkan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat menurun dan kemandirian daerah pun dapat tercapai (Kuncoro, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Bagi Hasil yang didapatkan pemerintah kota Bengkulu tahun 2008 adalah sebesar 24.961.955.906 jumlah ini sama artinya

dengan 5% dari total pendapatan yang ada di keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu yaitu 450.130.260.146, di tahun berikutnya 2009 jumlah Dana Bagi Hasil pada keuangan daerah pemerintahan kota Bengkulu adalah sebesar 26.785.041.384 yang mana jumlah ini artinya 5% dari 491.162.327.128 (total pendapatan). Pada tahun 2010 Dana Bagi hasil yang ada pada keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 25.424.293.453 atau sama artinya 4% dari 545.397.764.555 (total pendapatan), akan tetapi pada tahun selanjutnya Dana Bagi Hasil mengalami kenaikan kembali yang puncaknya terjadi pada tahun 2012 yaitu Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi di dalam keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu sebesar 41.940.358.395 yang artinya sama dengan 6% dari total pendapatan 679.024.009.266.

Kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap keuangan pemerintah kota Bengkulu sudah lumayan besar, karena mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, akan tetapi bila di dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bengkulu, Dana Bagi Hasil pemerintah kota Bengkulu memang masih kalah besarnya dibandingkan Dana Bagi Hasil yang didapatkan pemerintah kabupaten Muko-Muko (tabel 4.12 dan tabel 4.13), yaitu sebesar 225.830.000.000 dengan rata-rata pertahunnya 45.166.000.000. Untuk kedepannya pemerintah kota Bengkulu harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Sedangkan yang mendapatkan Dana Bagi Hasil terkecil adalah pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah 62.526.000.000 dan rata-rata pertahunnya 62.526.000.000.

Tabel 4.12
Dana Bagi Hasil
Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012
(dalam jutaan)

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Bengkulu Selatan	17.049	17.589	18.474	15.239	18.065
Bengkulu Utara	27.966	15.000	15.000	20.000	24.498
Rejang Lebong	18.946	18.947	21.136	26.975	23.241
Kaur	23.351	24.388	28.388	22.688	23.254
Seluma	22.545	39.385	44.893	21.494	24.776
Muko-muko	22.252	70.536	63.000	42.042	28.000
Lebong	22.759	23.000	47.734	21.197	35.987
Kepahiang	22.789	31.243	35.838	22.809	27.028
Bengkulu Tengah	-	1.280	14.000	20.000	27.246
Kota Bengkulu	24.961	26.785	25.424	29.084	41.940

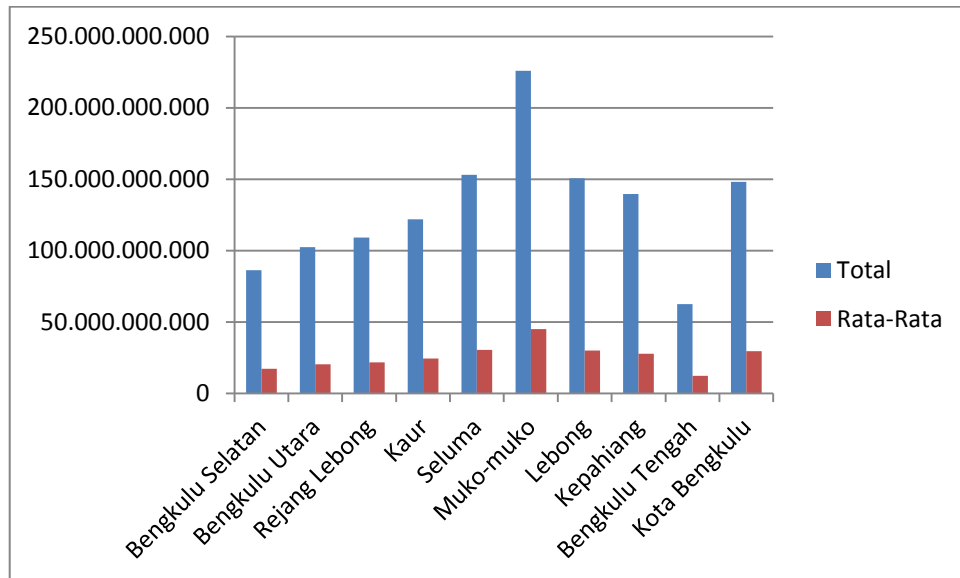
Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Tabel 4.13
Rata-Rata
Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012

Kabupaten/Kota	Total	Rata-Rata
Bengkulu Selatan	86.416.000.000	17.283.200.000
Bengkulu Utara	102.464.000.000	20.492.800.000
Rejang Lebong	109.245.000.000	21.849.000.000
Kaur	122.069.000.000	24.413.800.000
Seluma	153.093.000.000	30.618.600.000
Muko-muko	225.830.000.000	45.166.000.000
Lebong	150.677.000.000	30.135.400.000
Kepahiang	139.707.000.000	27.941.400.000
Bengkulu Tengah	62.526.000.000	12.505.200.000
Kota Bengkulu	148.194.000.000	29.638.800.000
Total Keseluruhan	1.300.221.000.000	130.022.100.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Gambar 4.9
Rata-Rata
Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012



4.2.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No.91/PMK.06/2007). Tujuan dari pengalokasian belanja modal adalah, semakin tinggi tingkat investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002).

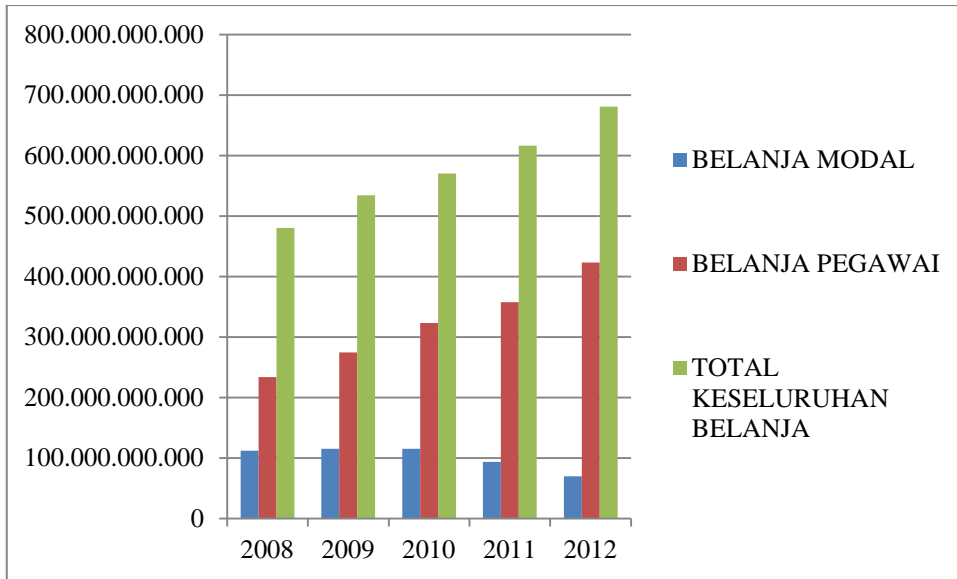
Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto, 2007), akan tetapi pada kenyataannya belanja modal belum menjadi prioritas utama pemerintah kota Bengkulu, hal ini terlihat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakn yaitu:

Tabel 4.14
Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Total Keseluruhan Belanja
Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008-2012

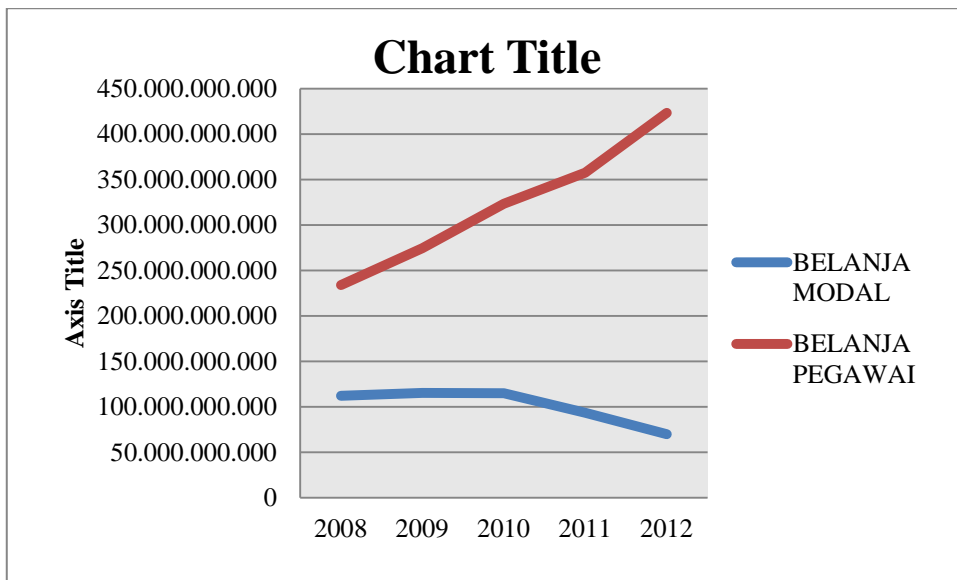
Tahun	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Total Keseluruhan Belanja
2008	112.180.601.172	233.883.242.533	480.574.171.588
2009	115.542.080.233	274.403.874.276	534.398.327.128
2010	115.111.396.042	323.266.446.450	570.363.945.292
2011	93.577.117.148	357.502.466.480	616.116.485.821
2012	69.968.319.945	423.393.724.367	680.584.694.537

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012.

Gambar 4.10
Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Total Keseluruhan Belanja
Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008-2012



Gambar 4.11
Belanja Modal Dan Belanja Pegawai
Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008-2012



Tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa belanja modal belum menjadi prioritas utama pemerintah kota Bengkulu, dimana tahun 2008 pengalokasian belanja modal dalam keuangan daerah pemerintahan kota

Bengkulu sebesar 112.180.601.172 atau sekitar 23% dari total belanja pemerintah kota Bengkulu yaitu 480.574.171.588, akan tetapi pada tahun 2012 belanja modal mengalami penurunan yang cukup besar sehingga jumlahnya hanya menjadi 69.968.319.945, bahkan belanja pegawai lah yang menjadi prioritas utama pemda kota Bengkulu karena setiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang signifikan. Belanja pegawai yang awalnya tahun 2008 sebesar 233.883.242.533 akan tetapi pada tahun 2012 menjadi 423.393.724.367.

Hal ini membuktikan pernyataan Kuncoro 2004, bahwa kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja dalam keuangan pemerintahan daerah. Selain itu, pemerintah daerah kota Bengkulu juga tidak melaksanakan kebijakan presiden dengan baik yaitu, jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29%(persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu periode dari tahun 2008-2012 (tabel 4.12 dan tabel 4.13), yang menganggarkan Belanja Modal paling besar adalah pemerintah kabupaten Kepahiang dengan jumlah 729.301.000.000 dan rata-rata pertahunnya adalah 145.860.200.000.

Sedangkan yang menganggarkan Belanja Modal terkecil adalah pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah 281.784.000.000 dan rata-rata pertahunnya adalah 56.356.800.000.

Tabel 4.15
Belanja Modal
Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012
(dalam jutaan)

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Bengkulu Selatan	116.313	79.380	92.168	67.065	76.133
Bengkulu Utara	124.799	107.640	80.213	92.329	102.510
Rejang Lebong	167.364	145.375	68.608	123.832	121.113
Kaur	100.246	104.186	66.823	72.645	90.405
Seluma	127.048	114.039	86.934	150.159	137.805
Muko-muko	92.221	185.313	84.763	82.979	233.638
Lebong	155.348	178.903	113.619	101.263	113.480
Kepahiang	186.584	182.745	135.486	121.029	103.457
Bengkulu Tengah		8.899	68.962	124.675	79.248
Kota Bengkulu	112.180	115.542	115.111	93.577	69.968

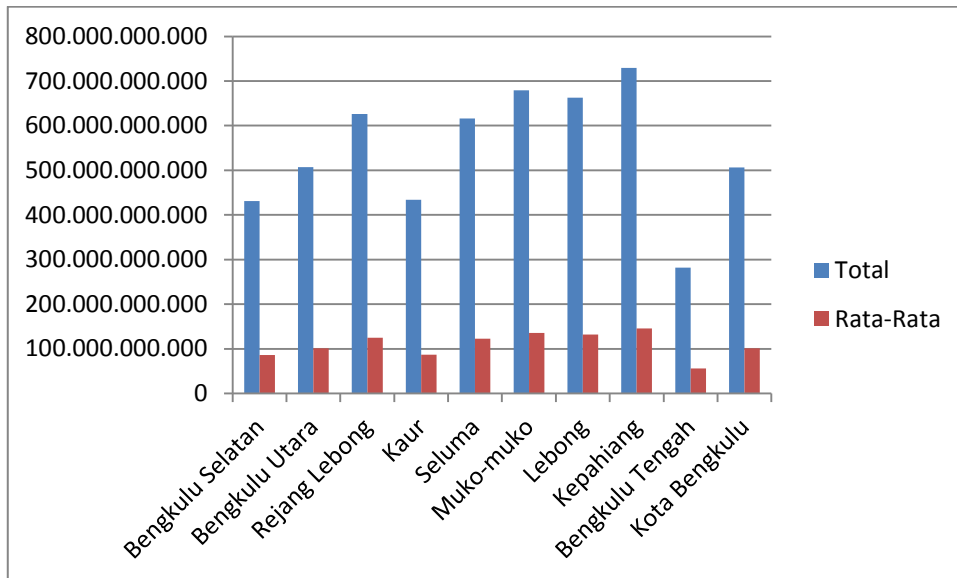
Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Tabel 4.16
Rata-Rata
Belanja Modal
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012

Kabupaten/Kota	Total	Rata-Rata
Bengkulu Selatan	431.059.000.000	86.211.800.000
Bengkulu Utara	507.491.000.000	101.498.200.000
Rejang Lebong	626.292.000.000	125.258.400.000
Kaur	434.305.000.000	86.861.000.000
Seluma	615.985.000.000	123.197.000.000
Muko-muko	678.914.000.000	135.782.800.000
Lebong	662.613.000.000	132.522.600.000
Kepahiang	729.301.000.000	145.860.200.000
Bengkulu Tengah	281.784.000.000	56.356.800.000
Kota Bengkulu	506.378.000.000	101.275.600.000
Total Keseluruhan	5.474.122.000.000	547.412.200.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2013.

Gambar 4.12
Rata-Rata
Belanja Modal
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
Periode 2008-2012



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa penelitian dari “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012)“, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012), menunjukkan pemerintah kota Bengkulu belum maksimal dalam pengolahan Pendapat Asli Daerah walaupun dari tahun 2008-2012 Pendapatan Asli Daerah kota Bengkulu terus mengalami kenaikan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah ini sendiri dalam keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu rata-rata pertahunnya adalah sekitar 7% dari total pendapatan yang berhasil didapatkan. Untuk kedepannya kenaikan yang terjadi harus terus dipertahankan dan dimaksimalkan lagi sumber-sumber pendapatan daerah pengolahannya belum maksimal seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir, karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan maka daerah tersebut akan semakin berkembang dan rakyatnya akan semakin sejahterah.

2. Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012), menunjukkan pemerintah kota Bengkulu masih tergantung dengan Dana Alokasi Umum karena jumlah Dana Alokasi Umum dalam keuangan daerah, rata-rata setiap tahunnya mencapai 68% dari total pendapatan. Untuk kedepannya, ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum ini harus dikurangi agar pemerintah kota Bengkulu bisa lebih mandiri dan tidak tergantung terhadap pemerintah pusat. Ada banyak cara agar pemerintah kota Bengkulu dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, yaitu lebih mengoptimalkan lagi Pendapatan Asli Daerahnya.
3. Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012), pemerintah kota Bengkulu secara perlahan-lahan harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat karena dari tahun 2008-2012 jumlah alokasi Dana Alokasi Khusus, masih cukup besar yaitu sekitar 5% dari total pendapatan yang ada di keuangan pemerintah kota Bengkulu. Walaupun Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dapat membantu kegiatan-kegiatan penting

yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan dan pertanian. Dengan berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, secara tidak langsung pemerintah daerah kota Bengkulu akan lebih leluasa dalam menjalankan otonomi daerah.

4. Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012), pemerintah kota Bengkulu sudah mengelolah sumber daya alam yang dimiliki dengan baik, dapat dilihat dari besarnya Dana Bagi Hasil yang didapatkan oleh pemerintah kota Bengkulu dari tahun 2008-2012 dalam kuangan daerahnya, yaitu menyumbangkan sekitar 5% dari semua pendapatan yang ada. Hal ini harus dipertahankan karena Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber dana potensial bagi pemerintah kota Bengkulu untuk membiayai sumber-sumber pembelanjannya atau paling tidak pemerintah kota Bengkulu harus mencontoh apa yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Muko-Muko yang mana kabupaten ini mampu mendapatkan Dana Bagi hasil tertinggi

dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya yaitu dengan total 225.830.000.000 dari periode 2008-2012.

5. Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012), membuktikan pemerintah kota Bengkulu dalam pengalokasian belanja daerahnya, masih mengutamakan belanja pegawai dari pada belanja modal karena jumlah pengalokasian belanja modal dalam keuangan daerah pemerintah kota Bengkulu hanya sekitar 20% dari total belanja yang dianggarkan. Hal ini sebenarnya terbalik, seharusnya belanja modal lah yang menjadi prioritas utama pemerintah kota Bengkulu karena belanja modal hasilnya akan lebih terasa ke masyarakat. Untuk ke depannya, pemda kota Bengkulu harus lebih meningkatkan lagi jumlah belanja modalnya tidak seperti pengalokasian belanja modal dari tahun 2008-2012. Selain untuk lebih mensejahterahkan rakyatnya, semakin besar pengalokasian belanja modal juga sesuai dengan perintah dari presiden Republik Indonesia, yaitu jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29%(persen) dari belanja daerah, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat di berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk peneliti selanjutnya, di sarankan agar sampel dan tempat penelitian yang diambil dibedakan dari penelitian ini sehingga lebih mengetahui tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah-pemerintah daerah yang lainnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah kota Bengkulu, sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan begitu diharapkan Pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar pemerintah, dan saran yang terakhir untuk pemerintah daerah adalah Penghapusan honor belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung atau lebih spesifik pada belanja modal dapat lebih mengefisienkan pengeluaran belanja modal.

3. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang tepat sehubungan dengan investasi yang akan dilakukan di daerah kota Bengkulu. Salah satu alasan kenapa investor di sarankan untuk melakukan investasinya di kota Bengkulu, adalah karena masih banyak sumber-sumber pendapat daerah yang belum dikelola secara maksimal seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2012. *Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, No.1.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No. 01. February 2007.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah*. 26 Januari 2012.
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Multivariat SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
- Halim, Abdul. 2001. *Bungai Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2009. *Problem Desentralisasi dan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*.
- Harianto, David dan Adi Priyo Hadi. 2007. *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Tinjauan Literatur Ekonomi Politik Pengaruh Transfer Pada Kinerja Keuangan Sektor Publik*.

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nugroho, Bhuono, Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS, Edisi I*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang *pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal* sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.05/2007.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Stungkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada pemkot/Pemkab Sumatera Utara)*. Juli. Medan.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung Alfabeta
- Syaiful. 2006. *Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal*. Jurnal Ekonomi, Vol 1, No 3; 45-51.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

www.bpk.go.id

www.djpk.depkeu.go.id

L
A
M
P
I
R
A
N

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2012



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	643.777.870.419,11	679.024.009.266,11	35.246.138.847,00	5,47	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	54.820.968.854,40	54.820.968.854,40	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26.891.593.920,00	26.891.593.920,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.514.329.920,00	1.514.329.920,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	456.069.920,00	456.069.920,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	303.000.000,00	303.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.01.11	Cottage	101.340.000,00	101.340.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.005.744.000,00	4.005.744.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
4.1.1.02.01	Restoran	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
4.1.1.02.02	Rumah Makan	1.845.264.000,00	1.845.264.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
4.1.1.02.03	Café	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
4.1.1.03.06	Diskotik	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2008

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	5 (Rp)	6 %	
1	2					
	PENDAPATAN	446.458.613.004,48	450.130.260.146,48	3.671.647.142,00	0,82	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.979.202.000,00	29.979.202.000,00	0,00	0,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.018.310.000,00	17.018.310.000,00	0,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.372.098.282,00	7.372.098.282,00	0,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.838.793.718,00	4.838.793.718,00	0,00	0,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	401.389.04.906,48	401.389.048.906,48	0,00	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.961.95.906,48	24.961.955.906,48	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	335.328.093.000,00	335.328.093.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	41.099.000.000,00	41.099.000.000,00	0,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.090.362.098,00	18.762.009.240,00	3.671.647.142,00	24,33	
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.082.457.600,00	7.082.457.600,00	3.000.000.000,00	73,49	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11.007.904.498,00	11.679.551.640,00	671.647.142,00	6,10	
2	BELANJA	469.578.202.693,54	480.574.171.588,67	10.995.968.895,13	2,34	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	245.270.242.533,00	245.348.829.510,13	78.586.977,13	0,03	
2.1.1	Belanja Pegawai	234.170.242.533,00	233.883.242.533,00	(287.000.000,00)	(0,12)	
2.1.4	Belanja Hibah	850.000.000,00	1.035.000.000,00	185.000.000,00	21,76	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.350.000.000,00	5.530.039.835,13	180.039.835,13	3,37	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.547.142,00	547.142,00	0,04	
2.2	BELANJA LANGSUNG	224.307.960.160,54	235.225.342.078,54	10.917.381.918,00	4,87	
2.2.1	Belanja Pegawai	28.949.314.800,00	29.283.856.300,00	334.541.500,00	1,16	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.122.302.780,00	93.760.884.606,00	6.638.581.826,00	7,62	
2.2.3	Belanja Modal	108.236.342.580,54	112.180.601.172,54	3.944.258.592,00	3,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.119.589.689,06)	(30.443.911.442,19)	(7.324.321.753,13)	31,68	

NOMOR JURUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.119.589.689,06	32.443.911.442,19	7.324.321.753,13	29,16
3.1.1.1		25.119.589.689,06	32.443.911.442,19	7.324.321.753,13	29,16
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2.2		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	23.119.589.689,06	30.443.911.442,19	7.324.321.753,13	31,68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BENGKULU, 24 Nopember 2008
WALIKOTA BENGKULU

H. AHMAD KANEDI

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2009



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		3	4	5	%			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	5	6		
1	2							
	PENDAPATAN	470.929.918.128,79	491.162.327.128,79	20.232.409.000,00	4,30			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.067.971.796,99	34.582.971.796,99	515.000.000,00	1,51			
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.218.310.000,00	17.218.310.000,00	0,00	0,00			
1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	9.212.242.865,00	9.212.242.865,00	0,00	0,00			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	901.952.083,19	1.156.952.083,19	255.000.000,00	28,27			
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.735.466.848,80	6.995.466.848,80	260.000.000,00	3,86			
1.1.4		420.253.251.384,00	420.253.251.384,00	0,00	0,00			
1.2	DANA PERIMBANGAN	26.785.041.384,00	26.785.041.384,00	0,00	0,00			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	350.293.210.000,00	350.293.210.000,00	0,00	0,00			
1.2.2	Dana Alokasi Umum	43.175.000.000,00	43.175.000.000,00	0,00	0,00			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	16.608.694.947,80	36.326.103.947,80	19.717.409.000,00	118,72			
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000,00	24.217.409.000,00	19.717.409.000,00	438,16			
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.108.694.947,80	12.108.694.947,80	0,00	0,00			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	505.700.665.096,79	534.398.327.128,79	28.697.662.032,00	5,67			
2	BELANJA	291.158.499.628,79	293.987.974.276,79	2.829.474.648,00	0,97			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	274.184.399.628,79	274.403.874.276,79	219.474.648,00	0,08			
2.1.1	Belanja Pegawai	6.724.100.000,00	7.904.100.000,00	1.180.000.000,00	17,55			
2.1.4	Belanja Hibah	5.400.000.000,00	7.280.000.000,00	1.880.000.000,00	34,81			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	0,00	0,00			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.450.000.000,00	1.000.000.000,00	(450.000.000,00)	(31,03)			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	214.542.165.468,00	240.410.352.852,00	25.868.187.384,00	12,06			
2.2	BELANJA LANGSUNG	28.687.779.300,00	30.481.791.300,00	1.794.012.000,00	6,25			
2.2.1	Belanja Pegawai	93.265.924.239,00	94.386.481.319,00	1.120.557.080,00	1,20			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.588.461.929,00	115.542.080.233,00	22.953.618.304,00	24,79			
2.2.3	Belanja Modal							
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.770.746.968,00)	(43.236.000.000,00)	(8.465.253.032,00)	24,35			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36.770.746.968,00	44.736.000.000,00	7.965.253.032,00	21,66
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.770.746.968,00	44.736.000.000,00	7.965.253.032,00	21,66
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(25,00)
3.2.2	Pembayaran Piutang Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3		1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	34.770.746.968,00	43.236.000.000,00	8.465.253.032,00	24,35
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Bengkulu, 5 Desember 2009
WALIKOTA BENGKULU

H. AHMAD KANEDI



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	
	PENDAPATAN	468.559.066.557,39	545.397.764.555,15	76.838.697.997,76	16,40	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.499.566.156,39	41.533.806.022,15	34.239.865,76	0,08	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19.642.011.119,35	19.642.011.119,35	0,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.074.652.318,65	12.074.652.318,65	0,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.388.342.499,83	1.422.582.365,59	34.239.865,76	2,47	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.394.560.218,56	8.394.560.218,56	0,00	0,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	404.950.805.453,20	402.250.805.453,20	(2.700.000.000,00)	(0,67)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.124.293.453,20	25.424.293.453,20	(2.700.000.000,00)	(9,60)	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	351.461.812.000,00	351.461.812.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	25.364.700.000,00	25.364.700.000,00	0,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.108.694.947,80	101.613.153.079,80	79.504.458.132,00	359,61	
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.108.694.947,80	15.508.694.947,80	3.400.000.000,00	28,08	
1.3.4	Dana Penyesuaian Fiskal	0,00	86.104.458.132,00	86.104.458.132,00	0,00	
2	BELANJA	510.730.454.440,00	570.363.945.292,00	59.633.490.852,00	11,68	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	310.860.903.700,00	341.100.412.700,00	30.239.509.000,00	9,73	
2.1.1	Belanja Pegawai	294.801,9	7.450,00	28.464.509.000,00	9,66	
2.1.4	Belanja Hibah	5.050.000.000,00	6.975.000.000,00	1.925.000.000,00	38,12	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.608.966.250,00	7.158.966.250,00	550.000.000,00	8,32	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Kelurahan	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	300.000.000,00	(700.000.000,00)	(70,00)	
2.2	BELANJA LANGSUNG	199.869.550.740,00	229.263.532.592,00	29.393.981.852,00	14,71	
2.2.1	Belanja Pegawai	29.350.997.300,00	28.517.370.606,00	(833.626.694,00)	(2,84)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.908.348.270,00	85.634.765.944,00	(8.273.582.326,00)	(8,81)	
2.2.3	Belanja Modal	76.610.205.170,00	115.111.396.042,00	38.501.190.872,00	50,26	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.171.387.882,61)	(24.966.180.736,85)	17.205.207.145,76	(40,80)	
	PEMBIAYAAN DAERAH					
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.171.387.882,61	33.766.180.736,85	(10.405.207.145,76)	(23,56)	
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.171.387.882,61	18.664.720.466,20	(25.506.667.416,41)	(57,74)	
3.1.1	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	15.101.460.270,65	15.101.460.270,65	0,00	
3.1.1.4						
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	8.800.000.000,00	6.800.000.000,00	340,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	7.300.000.000,00	6.300.000.000,00	630,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.171.387.882,61	24.966.180.736,85	(17.205.207.145,76)	(40,80)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

KOTA BENGKULU, 11 Desember 2010

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	5 (Rp)	6 %
1	2					
1	PENDAPATAN	562.155.921.047,10	615.877.514.247,10		53.721.593.200,00	9,56
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.574.964.682,39	46.574.964.682,39		0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.620.293.800,00	24.620.293.800,00		0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.032.088.516,80	12.032.088.516,80		0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.422.582.365,59	1.422.582.365,59		0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	452.334.296.348,00	454.334.296.348,00		2.000.000.000,00	0,44
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.084.351.348,00	29.084.351.348,00		2.000.000.000,00	7,38
1.2.2	Dana Alokasi Umum	397.878.445.000,00	397.878.445.000,00		0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.371.500.000,00	27.371.500.000,00		0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.246.660.016,71	114.968.253.216,71		51.721.593.200,00	81,78
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.339.661.016,71	16.339.661.016,71		0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian	46.906.999.000,00	98.628.592.200,00		51.721.593.200,00	110,26
2	BELANJA	562.921.268.790,92	616.116.485.921,22		53.195.217.030,90	9,45
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	371.776.088.699,92	384.024.392.730,82		12.248.304.030,90	3,29
2.1.1	Belanja Pegawai	345.824.162.449,92	357.502.466.480,82		11.678.304.030,90	3,38
2.1.4	Belanja Hibah	10.172.675.000,00	10.792.675.000,00		620.000.000,00	6,09
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.029.251.250,00	8.479.251.250,00		450.000.000,00	5,60
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelurahan	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00		0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(50,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	191.145.180.091,00	232.092.093.091,00		40.946.913.000,00	21,42
2.2.1	Belanja Pegawai	29.389.18.440,00	29.825.603.740,00		436.275.300,00	1,48
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.226.970.403,00	108.689.372.203,00		1.462.451.800,00	1,36
2.2.3	Belanja Modal	54.528.911.248,00	93.577.117.148,00		39.048.185.900,00	71,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	(765.347.743,82)	(238.971.574,72)		526.376.169,10	(68,78)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarain Sebelumnya	15.265.347.743,82	14.738.971.574,72	(526.376.169,10)	(3,45)	
3.1.2		15.265.347.743,82	14.738.971.574,72	(526.376.169,10)	(3,45)	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.3		12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO					
		765.347.743,82	238.971.574,72	(526.376.169,10)	(68,78)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kota Bengkulu, 20 Oktober 2011
WALIKOTA BENGKULU

H. AHMAD KANEDI

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		3	4	5	6	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		
1	2	643.777.870.419,11	679.024.009.266,11	35.246.138.847,00		5,47
1.1	PENDAPATAN	54.820.968.854,40	54.820.968.854,40	0,00		0,00
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.891.593.920,00	26.891.593.920,00	0,00		0,00
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.849.088.516,80	16.849.088.516,80	0,00		0,00
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00		0,00
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.880.286.417,60	8.880.286.417,60	0,00		0,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	535.974.051.348,00	549.830.058.395,00	13.856.007.047,00		2,59
1.2	DANA PERIMBANGAN	28.084.351.348,00	41.940.358.395,00	13.856.007.047,00		49,34
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	475.745.500.000,00	475.745.500.000,00	0,00		0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	32.144.200.000,00	32.144.200.000,00	0,00		0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	52.982.850.216,71	74.372.982.016,71	21.390.131.800,00		40,37
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.339.661.016,71	16.439.661.016,71	100.000.000,00		0,61
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.643.189.200,00	57.933.321.000,00	21.290.131.800,00		58,10
1.3.4	Dana Penyesuaian	638.883.870.419,11	66.584.694.537,20	41.700.824.118,09		6,53
2	BELANJA	455.047.485.254,11	476.369.275.617,20	21.321.790.363,09		4,69
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	407.611.234.004,11	423.393.724.367,20	15.782.490.363,09		3,87
2.1.1	Belanja Pegawai	31.915.000.000,00	35.194.900.000,00	3.279.900.000,00		10,28
2.1.4	Belanja Hibah	6.766.251.250,00	9.025.651.250,00	2.259.400.000,00		33,39
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	7.705.000.000,00	7.705.000.000,00	0,00		0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Kelurahan dan Partai Politik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00		0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	183.836.385.165,00	204.215.418.920,00	20.379.033.755,00		11,09
2.2	BELANJA LANGSUNG	32.754.123.400,00	35.491.889.950,00	2.737.766.550,00		8,36
2.2.1	Belanja Pegawai	85.352.420.820,00	98.755.209.025,00	13.402.788.205,00		15,70
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.729.840.945,00	69.968.319.945,00	4.238.479.000,00		6,45
2.2.3	Belanja Modal					
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.894.000.000,00	(1.560.685.271,09)	(6.454.685.271,09)		(131,89)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11.106.000.000,00	18.387.639.421,09	7.281.639.421,09	65,56
2.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	10.686.000.000,00	17.967.639.421,09	7.281.639.421,09	68,14
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	16.826.954.150,00	826.954.150,00	5,17
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengembalian Sisa Dana Transfer	14.000.000.000,00	14.361.284.700,00	361.284.700,00	2,58
		0,00	465.669.450,00	465.669.450,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(4.894.000.000,00)	1.560.685.271,09	6.454.685.271,09	(131,89)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

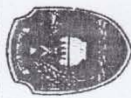
Kota Bengkulu, 25 Oktober 2012
WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2008

1 NOMOR URUT	2 URAIAN	3 JUMLAH (Rp)		4 SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		6 %	7 DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	3					
4	PENDAPATAN							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah							
4.1.1.01	Pajak Hotel	17.018.310.000,00	17.018.310.000,00		0,00	0,00		
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.990.951.950,00	1.990.951.950,00		0,00	0,00		
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	895.923.600,00	895.923.600,00		0,00	0,00		
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	298.643.400,00	298.643.400,00		0,00	0,00		
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	358.368.000,00	358.368.000,00		0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2002
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	197.109.000,00	197.109.000,00		0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2002
4.1.1.01.11	Cottage	107.503.200,00	107.503.200,00		0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2002
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kcc	111.996.000,00	111.996.000,00		0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2002
4.1.1.02	Pajak Restoran	21.402.750,00	21.402.750,00		0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2002
4.1.1.02.01	Restoran	7.063.535.078,00	7.063.535.078,00		0,00	0,00		Perda Nomor 21 Tahun 2002
4.1.1.02.02	Rumah Makan	6.071.883.948,00	6.071.883.948,00		0,00	0,00		Perda Nomor 21 Tahun 2002
4.1.1.02.03	Café	811.039.130,00	811.039.130,00		0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002
4.1.1.03	Pajak Hiburan	180.612.000,00	180.612.000,00		0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002
4.1.1.03.06	Diskotik	457.932.670,00	457.932.670,00		0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	312.157.560,00	312.157.560,00		0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	84.042.420,00	84.042.420,00		0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002
		14.407.200,00	14.407.200,00		0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4	PENDAPATAN	470.929.918.128,79	491.162.327.128,79	20.232.409.000,00	4,30		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.067.971.796,99	34.582.971.796,99	515.000.000,00	1,51		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.218.310.000,00	17.218.310.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01	Pajak Hotel	993.382.671,00	993.382.671,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	442.360.321,00	442.360.321,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	206.643.400,00	206.643.400,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	138.368.000,00	138.368.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	84.109.000,00	84.109.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	63.503.200,00	63.503.200,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002	
4.1.1.01.11	Cottage	46.995.000,00	46.995.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesangrahan/Hostel/Rumah Kos	11.402.750,00	11.402.750,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002	
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.229.487.885,00	3.229.487.885,00	0,00	0,00	Perda Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.02.01	Restoran	2.252.836.755,00	2.252.836.755,00	0,00	0,00	Perda Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	801.039.130,00	801.039.130,00	0,00	0,00	Perda Nomor 02 Tahun 2002	
4.1.1.02.03	Café	175.612.000,00	175.612.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 02 Tahun 2002	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 02 Tahun 2002	
4.1.1.03.06	Diskotik	34.224.890,00	34.224.890,00	0,00	0,00	Perda Nomor 02 Tahun 2002	
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	24.042.420,00	24.042.420,00	0,00	0,00	Perda Nomor 02 Tahun 2002	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	14.407.200,00	14.407.200,00	0,00	0,00	Perda Nomor 02 Tahun 2002	



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2010

1 NOMOR URUT	2 URAIAN	3 JUMLAH (Rp)		4 SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		6 %	7 DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	3		0,00	0,00		
4	PENDAPATAN							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	468.559.066.557,39	468.559.066.557,39	545.397.764.555,15	76.838.697.997,76	16,40		
4.1.1.1	Pajak Hotel	41.499.566.156,39	41.499.566.156,39	41.533.806.022,15	34.239.865,76	0,08		
4.1.1.1.01	Hotel Bintang Tiga	19.642.011.119,35	19.642.011.119,35	19.642.011.119,35	0,00	0,00		
4.1.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002
4.1.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	667.960.000,00	667.960.000,00	667.960.000,00	0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002
4.1.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	312.030.000,00	312.030.000,00	312.030.000,00	0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002
4.1.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	208.935.000,00	208.935.000,00	208.935.000,00	0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002
4.1.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	127.004.000,00	127.004.000,00	1.7.004.000,00	0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002
4.1.1.1.01.11	Cottage	95.890.000,00	95.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002
4.1.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	70.963.000,00	70.963.000,00	70.963.000,00	0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	17.218.000,00	17.218.000,00	17.218.000,00	0,00	0,00		Peraturan Daerah Kota Ben Tahun 2002
4.1.1.02.01	Restoran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00		Perda Nomor 20 Tahun 2002
4.1.1.02.02	Rumah Makan	2.790.333.000,00	2.790.333.000,00	2.790.333.000,00	0,00	0,00		Perda Nomor 20 Tahun 2002
4.1.1.02.03	Café	992.156.000,00	992.156.000,00	992.156.000,00	0,00	0,00		Perda Nomor 20 Tahun 2002
4.1.1.03	Pajak Hiburan	217.511.000,00	217.511.000,00	217.511.000,00	0,00	0,00		Perda Nomor 20 Tahun 2002
4.1.1.03.06	Diskotik	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	352.674.670,00	352.674.670,00	352.674.670,00	0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002
		72.127.260,00	72.127.260,00	72.127.260,00	0,00	0,00		Perda Nomor 02 Tahun 2002

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2011



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4	PENDAPATAN	562.155.921.047,10	615.877.514.247,10	53.721.593.200,00	9,56		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.574.964.682,39	46.574.964.682,39	0,00	0,00		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.620.293.800,00	24.620.293.800,00	0,00	0,00		
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.514.329.920,00	1.514.329.920,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	402.480.000,00	402.480.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	63.767.520,00	63.767.520,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	510.935.400,00	510.935.400,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	307.701.000,00	307.701.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	66.186.000,00	66.186.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.01.11	Cottage	101.340.000,00	101.340.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesangrahan/Hostel/Rumah Kos	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2002	
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.005.744.000,00	4.005.744.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 10 Juli 2002	
4.1.1.02.01	Restoran	2.088.900.000,00	2.088.900.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 10 Juli 2002	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	1.856.364.000,00	1.856.364.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 10 Juli 2002	
4.1.1.02.03	Café	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 10 Juli 2002	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	851.265.000,00	851.265.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	470.610.000,00	470.610.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 21 Januari 2002	
4.1.1.03.06	Diskotik	180.450.000,00	180.450.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 21 Januari 2002	
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	95.175.000,00	95.175.000,00	0,00	0,00		